

Determinasi dan Respon *Stakeholders* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nur Ravita Hanun¹, Sigit Hermawan², Detak Prapanca³

^{1, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Corresponding Author:

Nur Ravita Hanun

hanun@umsida.ac.id

ABSTRACT

This study deals with local original income as a determinant of district/city finances in the Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) period 2014–2018 and know the responses of the Stakeholders. The research method used is the mix method research. The hypothesis in this study is to explain the influence of tax ratios, retribution ratios, BUMD profit ratios, and other valid income ratios simultaneously, partially and dominantly on the financial performance of regencies or cities in the Gerbang Kertosusilo. To test this hypothesis data analysis tools are used in the form of multiple linear regression. Besides this research also uses a qualitative approach where triangulation techniques will test data collected from interviews, observations and documentation. The results of this study, all variables significantly influence regional financial performance. The stakeholders also justified this. The Financial Performance of Regional Governments reflects the ability of regional heads in managing and maintaining their regions.

Keywords: *Locally-generated revenue; Financial Performance; Stakeholders.*

Received
12-08-2020

Received in revised form
10-11-2020

Accepted
16-11-2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui determinasi kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di wilayah Gerbang Kertosusilo serta mengetahui bagaimana respon kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) periode 2014 - 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni riset kuantitatif yang diperkuat *additional analysis/information* dengan metode kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu menjelaskan adanya pengaruh rasio pajak, rasio retribusi, rasio laba BUMD, dan rasio pendapatan lain lain yang sah secara simultan, parsial dan dominan terhadap kinerja keuangan kabupaten atau kota di wilayah Gerbang Kertosusilo. Untuk menguji hipotesis ini digunakan alat analisis data berupa regresi linier berganda. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan diuji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh para stakeholders. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan kepala daerah dalam mengelola dan mensejahterakan daerahnya.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan; *Stakeholders*.

PENDAHULUAN

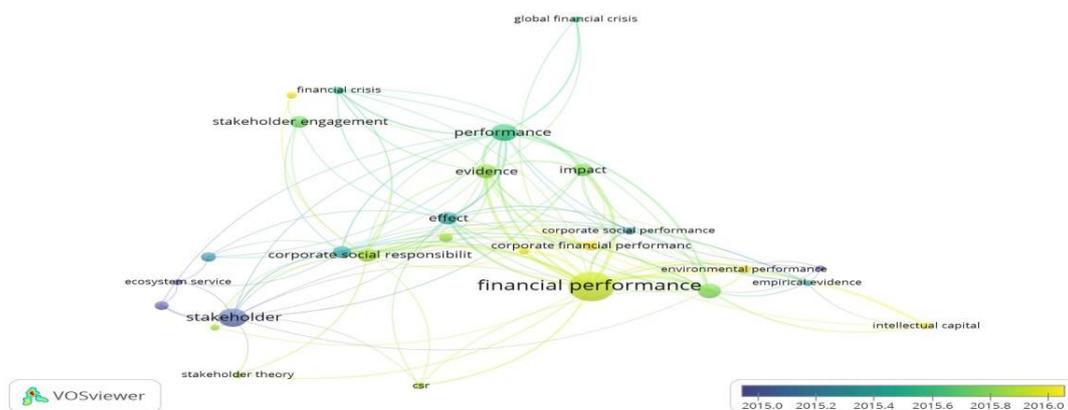
Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal yang bermuara terciptanya dinamika serta corak pembangunan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Julitawati et al., 2012).

Kinerja pemerintah dikelola oleh manajemen keuangan daerah, di mana manajemen keuangan daerah merupakan suatu lembaga dan pengelolaan sumber-sumber daya dan kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh daerah. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan disebut dengan kinerja pemerintah daerah sehubungan dengan efektifitas otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah (Florida, 2006)

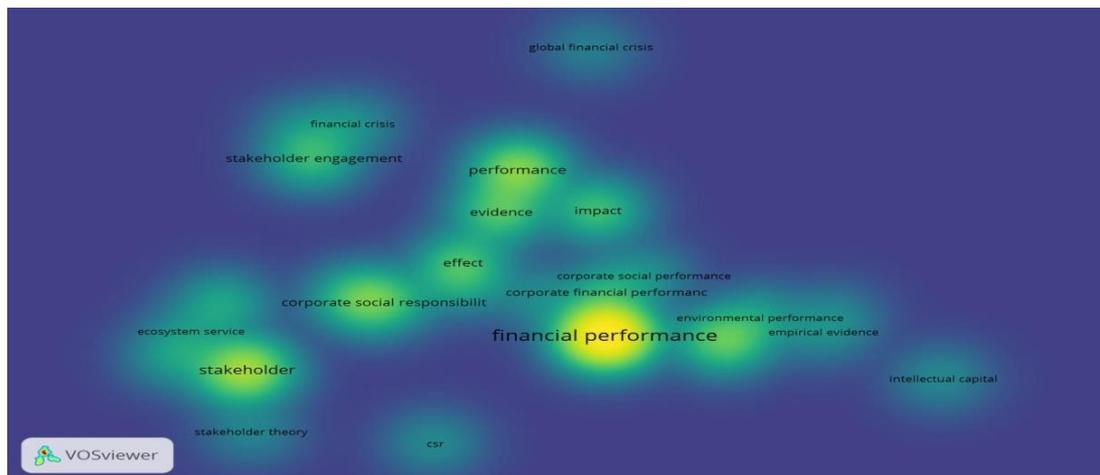
Penggalan kekayaan asli daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah (Suprianto, 2013).

Menurut Julitawati et al., (2012) menyatakan bahwa masalah yang paling besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan lemahnya pengelolaan potensi yang ada di daerah. Oleh karena itu perlu adanya manajemen pendapatan sehingga setiap daerah memahami potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan dapat memaksimalkan pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di wilayah Gerbang Kertosusilo serta mengetahui bagaimana respon kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Gerbang Kertosusilo.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dibanding penelitian lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Overlay Visualization



Gambar 2. Density Visualization

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 banyak dilakukan penelitian terkait *financial performance*. Semakin detail maka warna berwarna merah dan apabila warna berwarna biru hal ini menunjukkan bahwa pembahasan topik tersebut sedikit. Berbeda dengan lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan dari

wawancara, observasi dan dokumentasi akan diuji dengan teknik triangulasi serta menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis data berupa regresi linier berganda

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Prinsip tanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Halim, 2007). Perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan (Mahmudi, 2010). Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dari penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD (Adisasmita, 2011). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja sektor publik berpusat pada akuntansi keuangan yang memiliki fokus terhadap bagaimana proses penggunaan dana keuangan dan untuk apa (Bastian, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu bentuk statement daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/*blue print* dalam periode itu. Beberapa fungsi anggaran, yaitu sebagai instrumen politik, instrumen kebijakan fiskal, instrumen perencanaan, instrumen pengendalian (Wenny, 2012).

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Terkait bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD (Wenny, 2012). Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan yang ada. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain - lain PAD yang sah.

Kinerja Keuangan Daerah

Wenny (2012) menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran (Julitawati et al., 2012).

Stakeholders

Stakeholders adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, serta mengakui sifat saling mempengaruhi antarkeduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholders juga dianggap sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, antara lain (Alviya et al., 2012) :

1. *Stakeholder* utama; merupakan stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan. (Hossain & Alam, 2016); (Alviya et al., 2012); (Imron, 2015); (Istiqomah, 2015)) Misal: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Stakeholder pendukung; merupakan stakeholder yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek; tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut untuk bersuara serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder pendukung terdiri dari:
 - a. Lembaga atau aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggungjawab langsung (Wulansari, 2011). Contohnya: Pemerintahan Provinsi
 - b. Perguruan tinggi atau asosiasi profesi, memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah (Alviya et al., 2012; Wulansari, 2011).

Pada sisi lain, seringkali ditemukan adanya perbedaan persepsi antarstakeholder yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan dampak dari tujuan pengelolaan terhadap kondisi kehidupan. Perbedaan persepsi dan *interest* sering kali menghasilkan visi yang berbeda terhadap manajemen pada suatu area dan seringkali memicu terjadinya konflik. Tiap-tiap stakeholder yang terlibat harus diidentifikasi karena pada akhirnya kegiatan akan tergantung pada stakeholder yang terpilih dan dengan siapa stakeholder tersebut akan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan (Alviya et al., 2012).

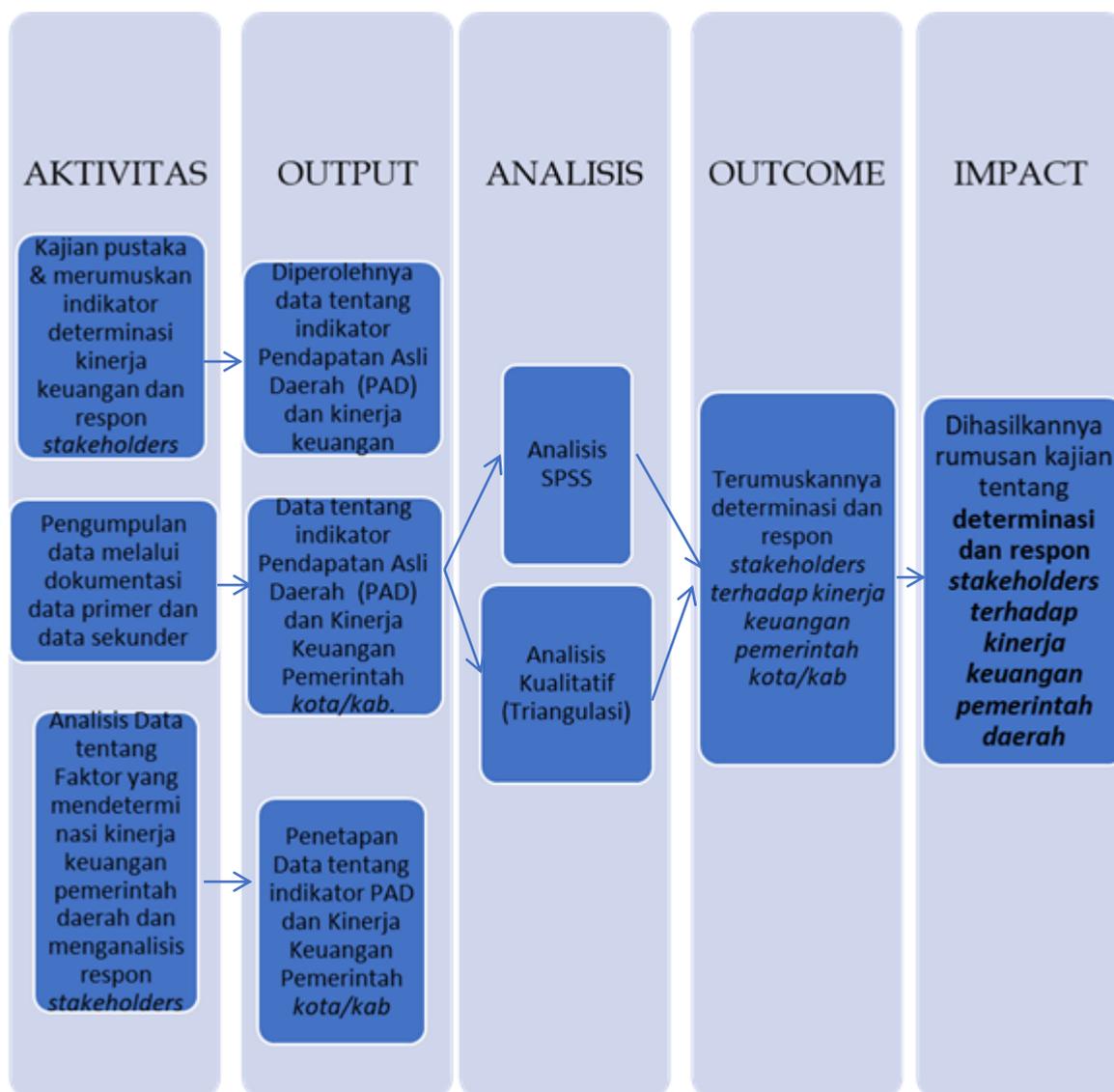
METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni riset kuantitatif yang diperkuat *additional analysis/information* dengan metode kualitatif. Sampling metode yang digunakan dalam uji analisis statistik yaitu mengambil data laporan keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten atau kota pada tahun 2014-2018. Data laporan dapat diperoleh melalui www.djpk.depkeu.go.id. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari hasil wawancara dengan BPKAD Prov. Jawa Timur, BPKAD Kab Sidoarjo dan Dosen/Pemerhati Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Laporan kinerja keuangan pemerintah dianalisis melalui uji statistik dan Persepsi stakeholder terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dianalisis kualitatif dengan teknik triangulasi. Penggunaan *mix* metode agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Informan
1.	SRY	Dosen dan Pemerhati Pemerhati Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah
2.	TW	Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPKAD Kab Sidoarjo
3.	IR	Kabid Bina Keuangan Kab/Kota BPKAD Jawa Timur

Tabel 2. Operasionalisasi Penelitian



Sumber: data diolah, 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk setiap variabel dependen dan independen yang dianalisis disajikan dalam tabel statistik deskriptif. Berasal dari analisis statistik deskriptif akan dapat diperoleh nilai rata-rata (*mean*), minimum, standar deviasi, dan nilai maksimum skor total dari setiap variabel (Sugiyono, 2016).

Tabel 3. Deskriptif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	35	1.23	43.22	14.23	13.09
Retribusi Daerah	35	.61	8.12	2.70	2.03
Laba BUMD	35	.09	2.19	.74	.60
Lain-Lain Pendapatan yang SAH	35	9.12	32.86	20.32	5.36
Kinerja Keuangan	35	8.13	60.97	26.38	15.35

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa:

1. Nilai rata-rata pada pajak daerah adalah sebesar 14,23 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 13,09 serta jumlah sampel valid sebesar 35 sampel.
2. Nilai rata-rata pada retribusi daerah adalah sebesar 2,70 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 2,03 serta jumlah sampel valid sebesar 35 sampel.
3. Nilai rata-rata pada laba BUMD adalah sebesar 0,74 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 0,60 serta jumlah sampel valid sebesar 35 sampel.
4. Nilai rata-rata pada lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar 20,32 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 5,36 serta jumlah sampel valid sebesar 35 sampel.
5. Nilai rata-rata pada kinerja keuangan adalah sebesar 26,38 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 15,35 serta jumlah sampel valid sebesar 35 sampel.

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	B	Standart Error	Sig.
Konstanta	12,138	1,859	0,000
Pajak Daerah (X1)	0,915	0,75	0,000
Retribusi Daerah (X2)	0,891	0,319	0,009
Laba BUMD (X3)	3,111	1,296	0,023
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X4)	-0,171	0,081	0,043
Kinerja Keuangan (X5)			

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

$$Y = 12,138 + 0,915 + 0,891 + 3,111 - 0,171 + e$$

Berdasarkan dari tabel di atas :

1. Nilai signifikan (sig.) dari variabel independen pajak daerah adalah sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikan (sig.) dari variabel independen retribusi daerah adalah sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
3. Nilai signifikan (sig.) dari variabel independen laba BUMD adalah sebesar $0,023 < 0,05$ yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
4. Nilai signifikan (sig.) dari variabel independen lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar $0,043 < 0,05$ yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Nilai R Square 0,978 ini sama dengan 97,8%. Artinya, pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan adalah sebesar 97,8% dari total 100%, sedangkan sisanya sebesar 2,2% merupakan faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen tersebut.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian statistik mengenai pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan nilai koefisien signifikansi $0,000 < 0,05$, berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Apabila terjadi perubahan variabel pajak daerah yang sah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,915%. Setiap kenaikan pajak daerah akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya penurunan pajak daerah akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan

pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Wenny (2012) bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian statistik mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan nilai koefisien signifikansi $0,009 < 0,05$, berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Wenny (2012) bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh laba BUMD terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian statistik mengenai pengaruh laba BUMD terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan nilai koefisien signifikansi $0,023 < 0,05$ berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa laba BUMD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Wenny (2012) bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap kinerja keuangan, Hasil pengujian statistik mengenai pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan nilai koefisien signifikansi $0,043 < 0,05$ berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Apabila terjadi perubahan variabel pendapatan lain-lain yang sah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebesar 10.712%. Setiap kenaikan pendapatan lain-lain yang sah akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya penurunan pendapatan lain-lain yang sah akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Wenny (2012) bahwa secara parsial pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Senada dengan hasil uji kuantitatif. Hasil uji kualitatif juga menunjukkan bahwa Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya.

"Ya pasti ada, kita bisa evaluasi terhadap keuangan daerah yang ada, bisa dilihat dari beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan sebagai indikator penilaian kinerja, misal rasio efektivitasnya, rasio aktivitasnya, bisa juga dari DCSR (Debt Service Coverage Ratio) nya, dari rasio-rasio tersebut ..." (kutipan wawancara dengan SRY)

Rasio kemandirian keuangan daerah pada Tahun 2017 adalah sebesar 138,7 persen dari target 320 persen atau realisasi capaian 43,3%. Hal ini, dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bahwa terdapat perubahan postur transfer dana perimbangan ke daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi. Semula dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

“Rasio kemandirian menunjukkan tren yang selalu menurun, Selain itu, kecilnya realisasi rasio kemandirian keuangan daerah disebabkan karena berdasarkan Undang-undang tersebut, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenanganp pemerintah kabupaten/kota sehingga retribusi pelayanan tera/tera ulang yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah menjadi berkurang” (Kutipan Wawancara dengan IR)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai determinasi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Gerbang Kertosusilo dapat disimpulkan bahwa secara simultan dan parsial dapat di tunjukkan bahwa keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai determinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Wilayah Gerbang Kertosusilo. Berdasarkan hasil analisis diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga mengurangi transfer dana pertimbangan dari pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Oleh karena setiap daerah dituntun untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memenuhi belanja daerah sehingga membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V. B., Maryani, R., & Syahadat, E. (2012). Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap hutan di daerah aliran sungai Tulang Bawang. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171-184.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka.
- Florida, A. (2006). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Hossain, M. M., & Alam, M. (2016). Corporate social reporting (CSR) and stakeholder accountability in Bangladesh. *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Imron, M. (2015).). Implementasi Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bono Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Jurnal Paradigma*, 3(3).
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, 3(1), 1-18.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 Tahun I, 1-15.
- Mahmudi, M. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kalitatif Dan R&D)*. Alfabeta.
- Suprianto. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada pemerintahan Provinsi Gorontalo*. Program Studi Strata Satu Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP Fotum Bisnis Dan Kewirausahaan (Online)*, Vol 2 No 1, 39-51.
- Wulansari, Y. (2011). *Desentralisasi Kehutanan : Studi Kasus Tarik Menarik Kepentingan Antara Stakeholders Dalam Pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo*. Universitas Airlangga.

Halaman ini sengaja dikosongkan